

**PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ORGANISASI
TAHUN 2024**



Jalan Bukit Trikora Salakan, Tinangkung,
Kabupaten Banggai Kepulauan,
Sulawesi Tengah

ortalbangkep@gmail.com

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi. Tujuannya adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan keuangan membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Organisasi Kabupaten Banggai Kepulauan sendiri mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang sudah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan dalam bentuk CaLK, untuk kepentingan antara lain:

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya keuangan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah sebagai bentuk kepatuhan terhadap antara lain:

- 1) Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 4) Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Momenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
- 19) Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;
- 23) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi.
- 24) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;
- 25) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 3.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.1. Pendapatan – LRA
 - 3.1.2. Belanja
 - 3.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 3.2.1. Pendapatan – LO
 - 3.2.2. Beban
 - 3.2.3. Kegiatan Non Operasional
 - 3.2.4. Pos Luar Biasa
 - 3.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
 - 3.3.1. Perubahan Ekuitas
 - 3.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 3.4.1. Aset
 - 3.4.2. Kewajiban
 - 3.4.3. Ekuitas
 - 3.5. Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual
- Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
- Bab V Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan sumber-sumber keuangan daerah. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki pagu Anggaran pada Tahun 2024 sebagai berikut:

2.1.1 Belanja Daerah

Tabel 2. 1 Belanja Daerah

	Anggaran 2024 (RP)	Realisasi 2024 (RP)	Perentase (%)	Realisasi 2023 (RP)
Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	1.165.000.000,00	1.128.105.310,00	96,83	800.826.701,00
Jumlah	1.165.000.000,00	1.128.105.310,00	96,83	800.826.701,00

Target belanja daerah setelah perubahan untuk tahun 2024 sebesar Rp. 1.165.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.128.105.310,00 atau 96,83 % dari pagu anggaran.

2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam rangka memaksimalkan peningkatan pendapatan dan realisasi belanja yang efektif dan efisien memang dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam melakukan tindakan nyata di lapangan dalam melakukan terobosan-terobosan yang cepat, tepat dan aktual secara berimbang dan dinamis. Kendala/hambatan dalam pelaksanaan APBD pada Tahun Anggaran 2024, antara lain:

2.2.1. Penyebab Capaian Target Belanja

Persentase Realisasi Belanja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebesar 96,83%. Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100% pagu anggaran. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah:

1. Pada Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang tidak terealisasi 9%, karena pembayaran dibayarkan berdasarkan at cost atau Jumlah tagihan sehingga permintaan jumlah pembayaran yang tertera pada DPA tidak sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.
2. Pada Belanja Jasa Lembur belum terealisasi 1%, karena Kekurangan Perhitungan Per Orang.
3. Pada Belanja Jasa Tenaga Ahli Tidak Terealisasi 5%, Karena ada pengurangan di SPK.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

3.1.1. Belanja

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun 2024		Tahun 2023	
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.165.000.000,00	1.128.105.310,00	817.716.500,00	800.826.701,00

Anggaran belanja daerah tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp. 1.165.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.128.105.310,00 atau 96,83 %. Komposisi pencapaian realisasi belanja disajikan dibawah ini:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Operasi	1.165.000.000,00	1.128.105.310,00	36.894.690,00	96.83	727.570.701,00
Belanja Modal	0	0	0	0	73.256.000,00
Jumlah	1.165.000.000,00	1.128.105.310,00	36.894.690,00	96.83	800.826.701,00

Berdasarkan rincian realisasi di atas, jika dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat Kenaikan sebesar realisasi Rp. 1.128.105.310 atau 96,83 %, Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan anggaran pada Tahun 2024 di Bagian Organisasi Setda sehingga berdampak juga peningkatan kegiatan dan realisasi.

Penjelasan lebih lanjut anggaran dan realisasi setiap jenis belanja daerah diuraikan sebagai berikut ini:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan realisasi anggaran belanja untuk kegiatan operasional sehari-hari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan yang memberi manfaat jangka pendek dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Pegawai	74.880.000,00	74.880.000,00		100%	80.940.000,00
Belanja Barang dan Jasa	1.090.120.000,00	1.053.225.310,00	36.894.690,00	96,62%	600.137.300,00
Jumlah	1.165.000.000,00	1.128.105.310,00	36.894.690,00	96,83%	727.570.701,00

Berdasarkan rincian di atas menunjukan bahwa belanja operasi apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terjadi kenaikan.

1.a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja pegawai pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 74.880.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 74.880.000,00, mengalami Kenaikan dibandingkan Tahun 2023 dengan persentase yang terealisasi 98,73% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023 (Rp)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	74.880.000,00	74.880.000,00		100%	80.940.000,00
Jumlah	74.880.000,00	74.880.000,00		100%	80.940.000

Berdasarkan rincian di atas, penjelasan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Honorarium	74.880.000,00	74.880.000,00		100%,	80.940.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	68.280.000,00	68.280.000,00		100%	73.840.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					500.000,00

Belanja Jasa Pengelolaan BMD	6.600.000,00	6.600.000,00		100%	6.600.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	6.600.000,00	6.600.000,00		100%	6.600.000,00
Jumlah	74.880.000,00	74.880.000,00	6.060.000,00	100%	80.940.000,00

1.a.1. Belanja Honorarium

Belanja honorarium pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 68.280.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 68.280.000,00 dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi 98,62% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	68.280.000,00	68.280.000,00		100%	73.840.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					500.000,00
Jumlah	68.280.000,00	68.280.000,00		100%	74.340.000,00

1.a.2. Belanja Belanja jasa pengelolaan BMD

Belanja jasa pengelolaan BMD pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 6.600.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 6.600.000,00.

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	6.600.000,00	6.600.000,00		100	6.600.000,00
Jumlah	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100	6.600.000,00

1.b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.053.225.310,00 atau 96,62% dari anggaran sebesar Rp. 1.090.120.000,00 dibandingkan tahun 2023 mengalami Kenaikan sebesar 37% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023 (Rp)
1. Belanja Barang	224.240.000,00	224.180.000,00	60.000,00	99,97	130.254.500,00
2. Belanja Jasa	505.440.000,00	494.369.000,00	11.071.000,00	97,81	252.189.500,00

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023 (Rp)
3. Belanja Perjalanan Dinas	330.440.000,00	304.676.310,00	40.489.609,00	92,20	264.186.701,00
Jumlah	1.090.120.000,00	1.053.225.310,00	337.167.709,00	96,62	646.630.701,00

1.b.1 Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 224.180.000,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp 224.240.000,00 dibandingkan tahun 2023 mengalami Kenaikan 27,89% dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Belanja Barang

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Barang	224.240.000,00	224.180.000,00	60.000,00	99,97	130.254.500,00
Jumlah	224.240.000,00	224.180.000,00	60.000,00	99,97	130.254.500,00

a). Belanja Barang Pakai Habis

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.460.000,00	51.460.000,00		100	23.470.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.400.000,00	4.400.000,00		100	3.360.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.420.500,00	61.420.500,00		100	23.080.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.819.500,00	23.759.500,00	90.000,00	99,75	23.049.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.800.000,00	7.800.000,00		100	7.560.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.340.000,00	75.340.000,00		100	49.735.000
Jumlah	224.240.000,00	224.180.000,00	90.000,00	99,97	130.254.500,00

Adapun jenis belanja barang pakai habis sebagai berikut:

1. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas terealisasi sebesar Rp. 51.460.000,00 atau 100% dari anggaran Rp. 51.460.000,00. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas pada Bagian Organisasi terdiri dari Bahan Bakar Minyak-Pertalite pada kegiatan penyediaan bahan logistik, kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan dan kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi.
2. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 4.400.000,00 pada kegiatan enyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 61.420.500,00. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor pada Bagian Organisasi terdiri dari Amplop, Ball Point, Binder Clips, Hekter-No.10, Isi Hekter, Kertas HVS, Lak Ban, Map, Tinta Printer, Buku Agenda Surat Keluar Masuk, Buku Kwitansi, dan Clip pada kegiatan penyediaan bahan logistik, kegiatan pengelolaan

- kelembagaan dan analisis jabatan, dan kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak terealisasi sebesar Rp. 23.759.500,00 atau 99,75% dari anggaran sebesar Rp. 23.819.500,00. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak pada Bagian Organisasi terdiri dari Fotocopy, Cetak Kulit/Jilid Buku, Jilid Hard Cover pada kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, dan kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Perangko terealisasi sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 7.800.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Perangko pada Bagian Organisasi terdiri dari Materai 10000 pada kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat dan kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 6. Belanja makanan dan minuman rapat terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 75.340.000,00. Belanja makanan dan minuman rapat pada Bagian Organisasi terdiri dari Makan dan Snack pada kegiatan penyediaan bahan logistik, kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, dan kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

1.b.2. Belanja Jasa

Belanja jasa pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 494.369.000,00 atau 97,81% dari anggaran sebesar Rp. 505.440.000,00 dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,97% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023
Belanja Jasa Kantor	505.440.000,00	494.369.000,00	11.071.000,00	97,81	252.189.500,00
Jumlah	505.440.000,00	494.369.000,00	11.071.000,00	97,81	252.189.500,00

Belanja Jasa terdiri dari Belanja Jasa Kantor dengan rincian realisasi sebagai berikut:

a). Belanja Jasa Kantor

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023 (Rp)
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					10.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	102.000.000,00	102.000.000,00		100	48.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	236.000.000,00	224.977.000,00	11.023.000,00	95,33	45.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					50.000.000,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	63.800.000,00	63.800.000,00		100	36.000.000,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					2.250.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.200.000,00	1.200.000,00		100	1.560.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.300.000,00	10.300.000,00		100	1.667.500,00
Belanja Lembur	82.140.000,00	82.092.000,00	48.000,00	99,94	57.712.000,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	10.000.000,00	10.000.000,00		100	

Jumlah	505.440.000,00	494.369.000,00	11.071.000,00	97,81	252.189.500,00
--------	----------------	----------------	---------------	-------	----------------

Adapun jenis belanja jasa kantor sebagai berikut:

1. Belanja jasa tenaga operator komputer terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 102.000.000,00. Belanja jasa tenaga operator komputer pada Bagian Organisasi terdiri dari tenaga operator komputer pada kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
2. Belanja Jasa Tenaga Ahli terealisasi 95,33% dengan anggaran sebesar Rp. 224.977.000,00. Belanja Jasa Tenaga Ahli pada bagian Organisasi terdiri dari Belanja Jasa Panitia Seleksi dan Tim Assecor pada kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan.
3. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 63.800.000,00. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi pada bagian Organisasi terdiri dari Honorarium Pengelola data Masker ASN pada kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
4. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan terealisasi sebesar Rp. 1.200.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 1.200.000,00. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan terealisasi sebesar Rp. 10.300.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 10.300.000,00. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan pada Bagian Organisasi terdiri dari Pajak Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua. Pada Kegiatan Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
6. Belanja Lembur terealisasi sebesar Rp. 82.092.000,00 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp. 82.140.000,00. Belanja lembur pada Bagian Organisasi terdiri dari Uang Lembur pada kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, dan kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
7. Belanja jasa Kontribusi Asosiasi terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00. Belanja jasa Kontribusi Asosiasi pada Bagian Organisasi pada kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan

1.b.3. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas sub akun perjalanan dinas dalam negeri pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 304.676.310,00 atau 92,20% dari anggaran sebesar Rp. 330.440.000,00,00 dibandingkan tahun 2023 mengalami kenaikan 84,67% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	330.440.000,00	304.676.310,00	25.763.690,00	92,20	264.186.701,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	293.640.000,00	268.491.310,00	25.148.690,00	91,44	207.930.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.400.000,00	23.400.000,00		100	18.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.400.000,00	2.100.000,00	300.000,00	87,50	4.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.000.000,00	10.685.000,00	315.000,00	97,14	33.806.701,00
Jumlah	330.440.000,00	304.676.310,00	25.763.690,00	92,20	264.186.701,00

Adapun jenis belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagai berikut:

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa terealisasi sebesar Rp. 268.491.310,00 atau 91,44% dari anggaran sebesar Rp. 293.640.000,00. Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Bagian Organisasi terdiri dari Dinas Perjalanan Dinas ke Jakarta Eselon II, Perjalanan Dinas ke Palu (Provinsi Sulawesi Tengah) Eselon III, dan Eselon IV, Gol.III , II, I dan Non PNS, Perjalanan Dinas ke Banggai Laut Eselon III, dan Eselon IV, Gol.III , II, I dan Non PNS pada kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, Perjalanan Dinas ke Palu (Provinsi Sulawesi Tengah) Eselon III, dan Eselon IV, Gol.III , II, I dan Non PNS, Perjalanan Dinas ke Banggai Laut Eselon III, dan Eselon IV, Gol.III , II, I dan Non PNS pada kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, dan Perjalanan Dinas ke Palu (Provinsi Sulawesi Tengah) Eselon III, dan Eselon IV, Gol.III , II, I dan Non PNS, Perjalanan Dinas ke Banggai Laut Eselon III, dan Eselon IV, Gol.III , II, I dan Non PNS pada Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
2. Belanja Perjalanan dinas dalam kota terealisasi sebesar Rp. 23.400.000,00 atau 100% dari anggaran . Belanja Perjalanan dinas dalam kota pada Bagian Organisasi terdiri dari Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kecamatan Buko, Bulagi Selatan, Liang, Peling Tengah, Tinangkung Selatan dan Totikum pada kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan.
3. Belanja Perjalanan dinas Paket Meeting dalam kota terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,00 atau 87,50% dari anggaran Rp2.400.000,00,00. Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota pada Bagian Organisasi terdiri dari Penginapan Hotel Salakan pada kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan.
4. Belanja Perjalanan dinas Paket Meeting luar kota terealisasi sebesar Rp. 10.685.000,00 atau 97,14% dari anggaran Rp. 11.000.000,00. Belanja Perjalanan dinas paket meeting luar kota pada Bagian Organisasi terdiri dari Penginapan Hotel Luwuk dan Transportasi Narasumber Jakarta dan Palu pada kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan.

2. Belanja Modal

Anggaran belanja modal pada tahun 2024 sebesar Rp.0,00 dan terealisasi 0%, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal			73.256.000,00	0	73.256.000,00
Jumlah			73.256.000,00	0	73.256.000,00

2.a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran belanja modal peralatan dan Mesin pada tahun 2024 sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi 0%, dengan rincian sebagai berikut:

3.

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Komputer			73.256.000	0	73.256.000,00
Jumlah			73.256.000,00	0	73.256.000,00

2.a.1. Belanja Modal Komputer

Anggaran belanja modal Komputer pada tahun 2024 sebesar Rp.0,00 dan terealisasi 0%, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Komputer Unit			56.000.000,00		56.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer			17.256.000,00		17.256.000,00
Jumlah			73.256.000,00		73.256.000,00

a). Belanja Modal Komputer Unit

Adapun Belanja Modal Komputer Unit pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% ,Dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Personal Komputer			56.000.000,00		56.000.000,00
Jumlah			56.000.000,00		56.000.000,00

Adapun jenis Belanja Modal Komputer Unit adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Personal Komputer terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%

b). Belanja Modal Peralatan Komputer

Adapun Belanja Modal Komputer Unit terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0% , Dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Peralatan Personal Komputer			17.256.000,00	0	17.256.000,00
Jumlah			17.256.000,00	0	17.256.000,00

Adapun jenis Belanja Modal Peralatan Personal Komputer adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Personal Komputer terealisasi sebesar Rp.0,00

C. Surplus/(Defisit)

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan kebijakan anggaran defisit sebesar Rp. 1.165.000.000,00 yang dalam pelaksanaan terdapat defisit/surplus sebesar Rp. 1.128.105.310,00. Hal ini disebabkan adanya realisasi pos pendapatan tidak mencapai target yang ditetapkan dan seluruh pos belanja daerah mengalami realisasi dibawah anggaran yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
	1.165.000.000,00	1.128.105.310,00	473.790.609,00	96,83
Surplus/Defisit	(1.165.000.000,00)	(1.128.105.310,00)	(473.790.609,00)	(96,83)

3.2. Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional

Kegiatan Operasional

3.2.1. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam pelaporan yang menrunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban – LO Tahun 2024 pada Bagian Organisasi yang terealisasi sebesar Rp. 1.128.105.310,00 dibandingkan Tahun 2023 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 400.534.609,00 atau 44,95% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Operasi	1.128.105.310,00	727.570.701,00	400.534.609,00	55%
Beban Penyusutan dan Amortasi	0	42.890.903,00	(42.890.903,00)	(100%)
Jumlah	1.128.105.310,00	770.461.604,00	357.643.706	46%

1. Beban Operasi

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pegawai	74.880.000,00	80.940.000,00	(6.060.000,00)	(7%)
Beban Barang dan Jasa	1.053.225.310,00	646.630.701,00	406.594.609,00	63%
Jumlah	1.128.105.310,00	727.570.701,00	(400.534.000,00)	55%

Berdasarkan rincian di atas menunjukan bahwa beban operasi Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.128.105.310,00 apabila dibandingkan beban operasi Tahun 2023 mengalami kenaikan Rp. 400.534.00,00 atau 55% dengan rincian sebagai berikut:

a. Beban Pegawai

Beban pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 74.880.000,00 mengalami Penurunan sebesar Rp. 6.060.000,00 atau 8% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 80.940.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Honorarium	68.280.000,00	74.340.000,00	6.060.000,00	12,03
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	68.280.000,00	73.840.000,00	(5.560.000,00)	(8%)
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		500.000,00	(500.000,00)	(100%)
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
Jumlah	74.880.000,00,0 0	80.940.000,00	6.060.000,00	(7%)

Beban pegawai-LO tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 74.880.000,00,00 jika dibandingkan dengan belanja pegawai-LRA sebesar Rp. 74.880.000,00,00 tidak terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	LO	LRA	SELISIH
Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	68.280.000,00	68.280.000,00	0,00
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			0,00
Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
Jumlah	74.880.000,00	74.880.000,00	0,00

b. Beban Barang dan Jasa

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Persediaan	130.254.500,00	130.254.500,00	(17.483.500,00)	(11,83)
Beban Jasa	252.189.500,00	252.189.500,00	14.317.200,00	6,02
Beban Perjalanan Dinas	264.186.701,00	264.186.701,00	58.159.701,00	28,23
Jumlah	80.940.000,00	80.940.000,00	7.980.000,00	10,94

1. Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan saldo beban barang periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp224.180.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 93.925.500,00 atau 27,89% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 130.254.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.460.000,00	23.470.000,00	27.990,000	119%
Beban Suku Cadang – Suku Cadang Alat Angkutan	4.400.000,00	3.360.000,00	1.040,000	69%
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.420.500,00	23.080.000,00	38,340,500	166%
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.759.500,00	23.049.500,00	710,000	3%
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	7.800.000,00	7.560.000,00	240,000	3%
Beban Makanan dan Minuman Rapat	75.340.000,00	49.735.000,00	25,605,000	49%
Jumlah	224.180.000,00	130.254.500,00	93,925,500	27,89%

Beban barang - LO tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 224.180.000,00 jika dibandingkan dengan belanja barang-LRA sebesar Rp. 224.180.000,00 tidak terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	LO	LRA	SELISIH
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.460.000,00	51.460.000,00	0,00
Beban Suku Cadang – Suku Cadang Alat Angkutan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan	61.420.500,00	61.420.500,00	0,00

Kantor-Alat Tulis Kantor			
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.759.500,00	23.759.500,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	75.340.000,00	75.340.000,00	
Jumlah	224.180.000,00	224.180.000,00	0,00

2. Beban Jasa

Beban jasa merupakan saldo beban jasa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 252.189.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 494.369.000,00 atau 96% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 252.189.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		10.000.000,00	(10.000.000)	(100%)
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	102.000.000,00	48.000.000,00	54.000.000	56,04
Belanja Jasa Tenaga Ahli	224.977.000,00	45.000.000,00	179.977.000	100%
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		50.000.000,00	(50.000.000)	(100%)
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	63.800.000,00	36.000.000,00	27.800.000	58,14
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		2.250.000,00	(2.250.000)	(100%)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.200.000,00	1.560.000,00	(360.000)	(77%)
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.300.000,00	1.667.500,00	8.632.500	100%
Belanja Lembur	82.092.000,00	57.712.000,00	24.380.000	58%
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	10.000.000,00		10.000.000	100%
Jumlah	494.369.000,00	252.189.500,0	242.179.500	96%

Beban jasa – LO tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 494.369.000,00 jika dibandingkan dengan belanja jasa-LRA sebesar Rp. 494.369.000,00 tidak terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	LO	LRA	SELISIH
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	224.977.000,00	224.977.000,00	0,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
Belanja Lembur	82.092.000,00	82.092.000,00	0,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	10.000.000,00	10.000.000,00	
Jumlah	494.369.000,00,0	494.369.000,00,0	0,00

3. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan saldo beban perjalanan dinas dalam negeri periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp 304.676.310,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 40,489,609,00 atau 85% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp. 264.186.701,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	268.491.310,00	207.930.000,00	60,561,310.00	29%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.400.000,00	18.450.000,00	4,950,000.00	27%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.100.000,00	4.000.000,00	(1,900,000.00)	(48%)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.685.000,00	33.806.701,00	(23,121,701.00)	(68%)
Jumlah	304.676.310,00	264.186.701,00	40,489,609.00	85%

Beban perjalanan dinas dalam negeri - LO tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 304.676.310,00, jika dibandingkan dengan belanja perjalanan dinas dalam negeri -LRA sebesar Rp 304.676.310,00 tidak terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	LO	LRA	SELISIH
Beban Perjalanan Dinas Biasa	268.491.310,00	268.491.310,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.685.000,00	10.685.000,00	0,00
Jumlah	304.676.310,00	304.676.310,00	0,00

2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi merupakan saldo beban penyusutan dan amortisasi periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 35,596,786,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (7.282.477,00) atau (20%) dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp.42,879,263,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	29.602.566,00	36.885.043,00	(7.282.477,00)	(20%)
Beban Penyusutan Gedung Bangunan	5.994.220,00	5.994.220,00	0	
Jumlah	35,596,786	42,879,263	(7.282.477,00)	(20%)

Beban penyusutan dan amortisasi - LO tahun 2024 tidak ada perbandingan dengan laporan realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	LO	LRA	SELISIH
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	29.602.566,00	29.602.566,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung Bangunan	5.994.220,00	5.994.220,00	0,00
Jumlah	35,596,786	35,596,786	0,00

3.2.2 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/defisit dari operasi adalah selisih beban selama periode pelaporan dari kegiatan operasional tahun 2024 sebesar Rp. (1.128.105.310,00).

3.2.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional sub akun surplus penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar dan defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang merupakan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 adalah Rp. 0,00 sama halnya tahun 2023 juga senilai Rp. 0,00.

3.2.4 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/defisit sebelum pos luar biasa adalah selisih antara Surplus/Defisit dari Operasi dan Kegiatan Non Operasional selama periode pelaporan tahun 2024 sebesar Rp. 1.128.105.310,00,00 dibanding Tahun 2023 sebesar Rp. 770.461.604,00 mengalami kenaikan Rp. 400.534.000,00 atau 58%..

3.2.5 Pos Luar Biasa

Pos luar biasa terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan atau sering/rutin terjadi, dan berada diluar pengaruh entitas yang bersangkutan. Pos luar biasa tahun 2024 nihil.

3.2.6 Surplus/Defisit - LO

Surplus/defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit-LO tahun 2024

sebesar Rp. 1.128.105.310,00 mengalami kenaikan Rp. 400.534.000,00 atau 58%..jika dibandingkan surplus/defisit-LO Tahun 2023 sebesar Rp. 770.461.604,00.

3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 sebagai berikut:

Uraian	2024	2023
Ekuitas Awal	593,041,767.33	562.665.030,33
Surplus/Depisit-LO	(1,163,702,096.00)	(770.461.604,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
- Koreksi Ekuitas	0.00	0,00
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	0.00	0,00
Ekuitas Akhir	1,128,105,310.00	800.826.701,00
	557,444,981.33	593.030.127,33

1.3.1 Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 sebesar Rp. 593,041,767.33 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023. Nilai ekuitas awal tahun 2024 jika dibandingkan dengan nilai ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp. 562.665.030,33,00 maka mengalami Kenaikan sebesar Rp. 30.376.737 atau 5% dari total ekuitas awal tahun 2023.

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus defisit-LO Bagian Organisasi Setda Kab. Banggai Kepulauan tahun 2024sebesar Rp (1,163,702,096.00) dihasilkan dari transaksi menutup akun surplus/defisit-LO yang jika dibandingkan dengan nilai surplus/defisit-LO tahun 2023 sebesar Rp (770.461.604,00) maka mengalami kenaikan sebesar Rp (400.534.000) atau 58%.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Bagian Organisasi Setda Kab. Banggai Kepulauan tahun 2023 merupakan koreksi-koreksi yang mempengaruhi ekuitas pada tahun 2024 berupa koreksi ekuitas lainnya yaitu sebesar Rp. (0,00).

4. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.128.105.310,00 dan apabila dibandingkan dengan Kewajiban untuk dikonsolidasikan tahun 2023 sebesar Rp. 800.826,701,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 127.729.401,00 atau 41%.

5. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 557,444,981.33 dan apabila dibandingkan dengan ekuitas akhir Tahun 2023 sebesar Rp. 593.030.127,33 mengalami Penurunan sebesar Rp. (35.596.786,00) atau (6%).

3.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022. Berikut ini disajikan penjelasan atas saldo akun yang tercantum dalam Neraca posisi 31 Desember 2023.

3.4.1 Aset

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Lancar	0,00	0,00
Aset Tetap	354.540.019,33	354.540.019,33
Aset Lainnya	238.490.108,00	238.490.108,00
Jumlah	593.030.127,33	593.030.127,33

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi penambahan aset yang dimiliki oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp. 30.365.097,00 atau 5,40%. Aset yang dimiliki oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan sebagian besar terdiri dari aset tetap yaitu 99 %.

1. Aset Lancar

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar	0,00	0,00

a. Kas

Kas Pada Tahun 2024 maupun Tahun 2023 di Neraca Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan tidak terdapat Saldo Kas atau NIHIL

b. Persediaan

Pengakuan persediaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kabupaten Banggai Kepulauan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan inventarisasi fisik yang dibuktikan dengan Berita Acara Stock Opname dari masing-masing entitas akuntansi. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 adalah tidak terdapat Saldo Persediaan atau NIHIL.

2. Aset Tetap

Saldo aset tetap sebesar Rp. 354.540.019,33 merupakan nilai seluruh aset tetap Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan per 31 Desember 2024. Daftar saldo aset tetap tercantum pada penjelasan masing-masing jenis aset tetap dapat dilihat sebagai berikut:

		Tahun 2023	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Tahun 2024
a.	Peralatan dan Mesin	2.536.667.292,00	0,00	0,00	2.536.667.292,00
b.	Gedung dan Bangunan	299.711.000,00	0,00	0,00	299.711.000,00
	Jumlah Aset Tetap	2.763.122.292,00	2.763.122.292,00	0,00	2.763.122.292,00
	Akumulasi Penyusutan	(2.438.947.369,67)	(2.481.838.272,67)		(2.481.838.272,67)
	Jumlah (Aset Tetap + Penyusutan)	324.174.922,33	354.540.019,33		354.540.019,33

a. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.536.667.292,00 berdasarkan hasil penilaian aset dan pengadaan yang telah

dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dapat dilihat uraian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Mutasi(+)	Mutasi (-)	Tahun 2024
- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	214.962.500,00			214.962.500,00
- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	123.123.450,00			123.123.450,00
- Alat Kantor Lainnya	925.513.242,00			925.513.242,00
- Meubelair	47.816.000,00			47.816.000,00
- Alat Pendingin	79.840.000,00			79.840.000,00
- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	43.755.000,00			43.755.000,00
- Meja Kerja Pejabat	2.200.000,00			2.200.000,00
- Kursi Kerja Pejabat	1.716.000,00			1.716.000,00
- Lemari dan Arsip Pejabat	25.972.500,00			25.972.500,00
- Peralatan Studio Video dan Film	27.440.000,00			27.440.000,00
- Alat Komunikasi Telephone	4.995.000,00			4.995.000,00
- Peralatan Pemancar VHF/FM	94.259.259,00			94.259.259,00
- Data Acquisition and Analizing System	69.940.000,00			69.940.000,00
- Personal Komputer	448.169.000,00	56.000.000,00		504.169.000,00
- Peralatan Mainframe	1.500.000,00			1.500.000,00
- Peralatan Personal Komputer	94.731.600,00	17.256.000,00		111.987.600,00
- Peralatan Jaringan	257.478.000,00			257.478.000,00
Jumlah	2.463.411.292,00	73.256.000,00		2.536.667.292,00

Nilai aset tetap peralatan dan mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 berdasarkan mutasi penambahan dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Awal awal 1 Januari 2024	Rp.	2.463.411.292,00
Mutasi Tambahan Tahun 2024		
* Belanja Modal Alat Angkutan	Rp.	0,00
* Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp.	0,00
* Belanja Modal Komputer	Rp.	73.256.000,00
* Belanja Modal Alat Studio	Rp.	0,00
Jumlah mutasi penambahan	Rp.	2.536.667.292,00
Mutasi Kurang:		
* Penyusutan alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	0,00

* Penyusutan alat Kantor	Rp.	0,00
* Penyusutan alat Studio	Rp.	0,00
* Penyusutan Komputer Unit	Rp.	0,00
Jumlah mutasi Pengurangan	Rp.	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp.	2.536.667.292,00

b. Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 299.711.000,00 berdasarkan hasil penilaian aset dan pengadaan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dapat dilihat uraian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Mutasi(+)	Mutasi (-)	Tahun2024
- Rumah Negara Golongan III	299.711.000,00			299.711.000,00
Jumlah	299.711.000,00			299.711.000,00

Nilai aset tetap gedung dan bangunan yang disajikan tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 berdasarkan mutasi penambahan dengan rincian sebagai berikut.

- Saldo Awal awal 1 Januari 2024	Rp.	299.711.000,00
Mutasi Tambahan Tahun 2024		
* -	Rp.	0,00
Jumlah mutasi penambahan	Rp.	-0,00
Mutasi Kurang:		
* -	Rp.	0,00
Jumlah mutasi Pengurangan	Rp.	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp.	299.711.000,00

c. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan adalah perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun ditentukan dengan menggunakan dengan pendekatan per semester dimana penyusutan dihitung bulanan. Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar (2.481.838.272,67) dapat disajikan sebagai berikut:

- 1) Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin (2.433.872,00)
- 2) Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan (47.965.400,67)

3. Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 238.490.108,00 rincian nilai pada tabel berikut.

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	49.830.000,00	49.830.000,00	0,00
2	Aset Rusak Berat/Usang	188.660.108,00	188.660.108,00	0,00
Jumlah		238.490.108,00	238.490.108,00	0,00

a. Aset Lain-lain

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp 288.440.108,00 berdasarkan hasil penilaian aset dan pengadaan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dapat dilihat uraian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Mutasi(+)	Mutasi (-)	Tahun2024
Aset Tidak Berwujud	49.830.000,00			49.830.000,00
Aset Rusak Berat/Usang	188.660.108,00			188.660.108,00
Jumlah	238.490.108,00			238.490.108,00

Nilai aset tetap lainnya yang disajikan tersebut merupakan nilai per 31 Desember 2024 berdasarkan mutasi penambahan dengan rincian sebagai berikut.

- Saldo Awal awal 1 Januari 2024	Rp. 238.490.108,00
Mutasi Tambahan Tahun 2024	
* -	Rp. 0,00
Jumlah mutasi penambahan	Rp. 0,00
Mutasi Kurang:	
* -	Rp. 0,00
Jumlah mutasi Pengurangan	Rp. 0,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp. 238.490.108,00

Penjelasan mutasi tersebut di atas sebagai berikut:

- Belanja modal tahun 2024 sebesar Rp. 0,00
- Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp . 238.490.108,00

3.4.2. Kewajiban

Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang yang timbul dari transaksi pada masa lalu.Saldo Kewajiban Bagian Organisasi Setda Kabupaten

Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 0,00 , begitu pula dengan Tahun Anggaran 2023.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek pada tahun 2024 Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan tidak memiliki Kewajiban Jangka Pendek begitu pula dengan Tahun Anggaran 2023.

2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang PFK per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0,00 begitu pula dengan Tahun Anggaran 2023.

3. Utang Beban

Utang beban per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00 begitu pula dengan Tahun Anggaran 2023.

3.4.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 593.030.127,33 mengalami kenaikan sebesar Rp. (30.365.097,00) atau (5,40%) dari per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 562.665.030,33

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

4.1. Gambaran Umum Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan, Bagian Organisasi berada dibawah Asisten Administrasi Umum dan membawahi tiga Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

4.2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi dan Tata kerja Sekretariat Daerah.

1. Tugas

Dalam ketentuan tersebut Bagian Organisasi berada dibawah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi ;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi ;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja Reformasi Birokrasi ;

- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya ; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3. Struktur Organisasi

1. Kepala Bagian

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dibantu tiga Kepala Sub Bagian :

- a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan analisis jabatan berada di bawah Kepala Bagian yang mempunyai tugas :

1. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan;
2. menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja ;
3. menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan Perangkat Daerah;
4. menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan unit pelaksanaan teknis daerah;
5. menyusun standar kompetensi Jabatan;
6. menyusun analisis jabatan, analisis jabatan, analisis jabatan, dan evaluasi jabatan
7. menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi Perangkat Daerah
8. menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah ;
9. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
10. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

b. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana berada di bawah Kepala Bagian yang mempunyai tugas :

1. melaksanakan pengelolaan administrasi dan rencana kegiatan ;
2. menyusun pedoman tata naska dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja ;
3. menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/ organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Perangkat Daerah;
4. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar pelayanan Publik ;
5. menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional Prosedur yang di susun oleh masing-masing perangkat Daerah ;
6. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik ;
7. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik ;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

c. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi berada di bawah Kepala Bagian yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencan kegiatan ;

- b. menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi ;
- c. menyusun bahan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ;
- d. menyusun road map Reformasi Birokrasi ;
- e. melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi ; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa skarang dan masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Kepemerintahan yang baik (good governance) bisa diwujudkan jika ketersediaan aparatur yang memadai, ideal, kreatif, inovatif, berkualitas dan disertai pendistribusian yang tepat sesuai dengan ketentuan standar kompetensi jabatan serta kajian analisis jabatan dan beban kerja.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam menjalankan peran untuk dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan Tahun 2024 berjumlah 11 orang, seperti yang terlihat pada komposisi jabatan dalam struktur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tabel I.1. terdapat ketidak seimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan aparatur berdasarkan kajian analisis jabatan dan analisis beban kerja, mengalami kekurangan baik pada jabatan structural maupun jabatan fungsional.

TABEL I.1

KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN ESELON JABATAN

No	Uraian	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala Bagian	1	-	-	1
2.	Sub Bagian Kelembagaan dan analisis jabatan	-	1	0	1
3.	Sub Bagian Pelayanan public dan tata laksana	-	1	0	1
4.	Sub Bagian Kinerja dan reformasi birokrasi	-	1	1	2
5.	Pejabat Fungsional	-	-		6

Sumber : Bag. Organisasi Setda Kab. Bangkep (2024)

Yang menjadi catatan dalam struktur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah adalah belum terpenuhinya jabatan fungsional Staf/Pelaksana pada Sub Bagian Kelembagaan dan analisis jabatan sesuai kajian analisis jabatan dan analisis beban kerja dan terdapatnya kekurangan jabatan fungsional Staf/Pelaksana di setiap Sub Bagian yang dibutuhkan sesuai formasi yang diusulkan kepada pihak yang berhak menyediakan formasi serta adanya kebijakan nasional terhadap perubahan struktur Perangkat Daerah. Kondisi kepegawaian Bagian Organisasi Sekretariat Daerah berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel I.2 di halaman berikut ini :

TABEL I.2
KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
(POSISI TAHUN TERAKHIR / 2024)

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	Kepala Bagian		1							1
2.	Sub Bagian Kelembagaan dan analisis jabatan	-	-	1			-	-		1
3.	Sub Bagian Pelayanan publik dan tata laksana	-	1				-	-		1
4.	Sub Bagian Kinerja dan reformasi birokrasi	-	-	2	-		-	-		2
5.	Pejabat Fungsional	-	-	5	1	-	-	-	-	6
Jumlah			2	8	1					11

Sumber : Bag. Organisas Setda Kab. Bangkep (2024)

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data pada Tabel 2.2, meskipun terdapat kekurangan aparatur namun tingkat pendidikan karyawanBagian Organisasi Sekretariat Daerah yang paling banyak adalah pendidikan S1 berjumlah 3 orang. Tingkat pendidikan terbesar dari karyawan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja secara umum sebagai lembaga yang menjadi unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam hal melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan pedoman pembinaan di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publikdan tata laksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi secara optimal. Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah dampak dari kebijakan Pemerintah hal Penyetaraan Jabatan Pengawas yakni belum terpenuhinya penyesuaian pembayaran Tunjangan Fungsional yang sesuai ketentuan Perundang-Undangan. Sekalipun kebijakan internal Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan belum memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, dan berdampak juga sampai belum menarik minat untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional dan ini terjadi pada setiap Perangkat daerah.

Dengan kondisi tadi adalah merupakankendala dan yang menjadi isu strategis di Bagian Organisasi Sekretariat DaerahKabupaten Banggai Kepulauan adalah mengenai sering berubah-ubahnya regulasi tentang perangkat daerah, termasuk penyederhanaanbirokrasi ASN yang diinginkan oleh Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah melaksanakan sangat cepat.

BAB V
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 secara keseluruhan. Semoga CaLK ini membantu, mempermudah dan memperjelas pemahaman pembaca laporan keuangan dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan

Salakan , 14 Februari 2025

KEPALA BAGIAN ORGANISASI



HERMANTO MAR,UN, SP.,MP
NIP. 19770930 2007011 012

L A M P I R A N